

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Dinas Kehutanan Minta Anggaran Pembelian Lahan Rp 1,76 Triliun

DKI memerlukan tambahan lahan sekitar 325 hektare per tahun untuk ruang terbuka hijau.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Dinas Kehutanan DKI Jakarta mengusulkan anggaran pengadaan lahan pada tahun depan sebesar Rp 1,76 triliun. Pengadaan lahan itu untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH) dalam bentuk makam, taman, dan hutan kota.

Kepala Subbagian Tata Usaha Dinas Kehutanan DKI, Dudung, mengatakan usulan anggaran pengadaan lahan pada tahun depan bertambah dibanding tahun ini yang hanya Rp 1,67 triliun. "Ada peningkatan untuk menyesuaikan dengan harga NJOP (nilai jual obyek pajak) yang naik tiap tahun," kata dia ketika dihubungi *Tempo*, kemarin.

Dudung menerangkan bahwa anggaran Rp 1,76 triliun pada 2020 akan dibagi untuk pengadaan tanah makam sebesar Rp 166,24 miliar, hutan kota Rp 604,8 miliar, dan taman Rp 1,008 triliun.

Adapun pada 2019, ang-

garan sebesar Rp 1,67 triliun dibagi untuk pengadaan lahan taman Rp 1,12 triliun, hutan kota Rp 304 miliar, dan makam Rp 250 miliar. Realisasinya, pengadaan lahan tahun ini baru 14,83 hektare untuk taman, 1,86 hektare untuk hutan kota, dan 1,36 hektare untuk makam.

Gubernur Anies Baswedan sebelumnya mengungkapkan, pada tahun ini, pemerintah Jakarta akan membangun 53 Taman Maju Bersama yang juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. "Pada 2022 akan ada 200 lebih taman baru," kata dia, Ahad lalu.

Dalam pembangunan Taman Maju Bersama, menurut Anies, pemerintah DKI juga melibatkan masyarakat. "Masyarakat sekitar taman diajak berunding dan merancang bersama."

Ahli tata kota dari Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, menilai upaya pemerintah DKI untuk menambah ruang terbuka hijau dengan membeli lahan tidak efektif. Cara itu pun memerlukan waktu

lama karena pemerintah Jakarta perlu memastikan agar tanah yang akan dibeli tidak dalam sengketa.

Nirwono memperkirakan Dinas Kehutanan hanya bisa membeli lahan sekitar 20 hektare setiap tahunnya. Padahal, untuk mengejar

"Pada 2022 akan ada 200 lebih taman baru."

ruang terbuka hijau sebanyak 30 persen dari luas Jakarta pada 2030, pemerintah DKI harus membeli lahan baru seluas 325 hektare per tahun. "Seharusnya pemerintah DKI berpikir bagaimana mencapai target RTH 30 persen itu secara cepat," kata dia.

Nirwono pun menyarankan agar pemerintah DKI menambah ruang terbuka hijau dengan menggandeng instansi lain yang memiliki lahan kosong. Misalnya, pemerintah Jakarta bisa bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia untuk mengubah bantaran rel untuk ruang terbuka hijau.

Pada kesempatan berbeda, Anies mengatakan penambahan ruang terbuka hijau bukan hanya tugas pemerintah Jakarta. Karena itu, dia meminta masyarakat berkontribusi dalam penambahan jalur hijau itu.

Pemerintah DKI, kata Anies, akan memberi insentif bagi pemilik lahan kosong di jalan protokol yang mau mengubah lahannya menjadi ruang terbuka hijau. "Kami berikan insentif dalam bentuk pajak, sehingga mereka yang ikut menghijaukan dapat insentifnya," ujar Anies.

Sebelumnya, Anies menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengenaan

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Dinas Kehutanan Minta Anggaran Pembelian Lahan Rp 1,76 Triliun

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atas Objek Pajak Bangunan Berupa Rumah untuk Tahun Pajak 2019.

Peraturan itu menyebabkan pajak tanah kosong di sepanjang Jalan M.H. Thamrin, Jenderal Sudirman, Gatot Subroto, M.T. Haryono, dan H.R. Rasuna Said akan di-

naikkan 100 persen. Namun, bila lahan kosong itu dijadikan ruang terbuka hijau, pajaknya hanya akan ditarik 50 persen.

Anies pun berencana memperluas insentif pajak itu untuk pemilik lahan di kawasan lainnya. "Dengan cara itu, usaha meraih target RTH bukan hanya oleh pemerintah," kata dia.

● TAUFIQ SIDDIQ

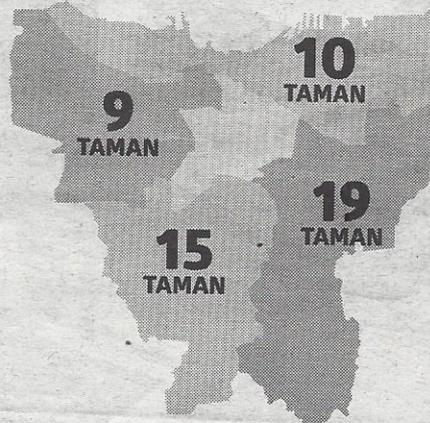
Tak Sampai Satu Persen

PADA 2030, pemerintah DKI Jakarta mematok target penambahan ruang terbuka hijau (RTH) sampai 30 persen dari luas Ibu Kota. Hingga awal tahun ini, luas RTH di Jakarta baru sekitar 14,9 persen. Itu pun hanya 7 persennya yang dikuasai pemerintah DKI.

Pengamat tata kota dari Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, menilai penambahan lahan untuk ruang terbuka hijau di Ibu Kota tidak signifikan. Dia mencatat, saban tahun, Dinas Kehutanan DKI hanya membeli lahan maksimal sekitar 20 hektare. Bila dibandingkan dengan luas wilayah Jakarta, sekitar 66.233 hektare, penambahan lahan untuk RTH itu tak sampai satu persennya.

Berikut ini pelbagai upaya pemerintah Jakarta untuk menambah RTH di Ibu Kota:

1. Membangun 53 Taman Maju Bersama pada 2019



2. Pengadaan tanah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD PERUBAHAN 2019

- Pengadaan tanah makam Rp 250 miliar
- Pengadaan tanah hutan kota Rp 304 miliar
- Pengadaan tanah taman Rp 1,12 triliun

Total Rp 1,67 triliun

RANCANGAN APBD 2020

- Pengadaan tanah makam Rp 166,24 miliar
- Pengadaan tanah hutan kota Rp 604,8 miliar
- Pengadaan tanah taman Rp 1,008 triliun

Total Rp 1,76 triliun

3. Memberikan insentif pajak

Lahan kosong di sepanjang Jalan M.H. Thamrin, Jenderal Sudirman, Gatot Subroto, M.T. Haryono, dan H.R. Rasuna Said dikenai pajak dua kali lipat. Namun, jika tanah kosong itu dijadikan RTH, pajaknya dipangkas menjadi 50 persen.

● GANGSAR PARIKESIT